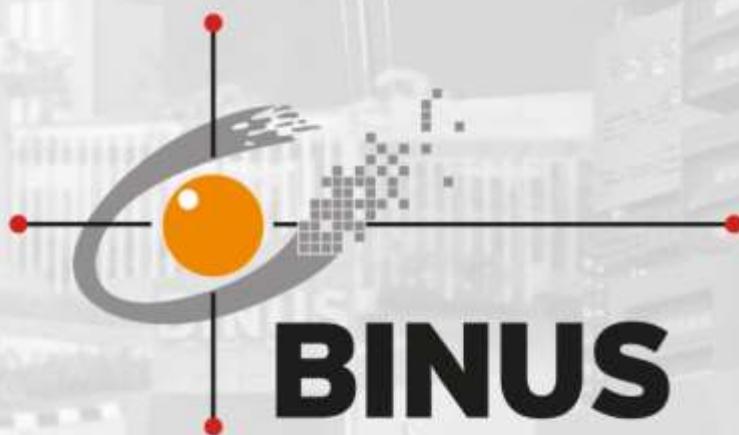




SEJARAH DAN PRESTASI

10 TAHUN

BUSINESS LAW BINUS UNIVERSITY



**LAPORAN PERKEMBANGAN JURUSAN
(JULI 2020-MEI 2021)**

INTRODUCING OUR NEW MASCOT



Bang Bilaw

FILOSOFI *Bang Bilaw*

Bilaw adalah representatif dari Dosen Business Law Binus University yang memiliki keceriaan dan semangat dalam membagikan ilmu kepada mahasiswa.

Unsur warna biru dan kuning yang sama pada logo BINUS University dan Dies Natalis Business Law menggambarkan kesatuan dan semangat Jurusan Business Law dalam memajukan dan memberdayakan seluruh aspek BINUS University.



KATA SAMBUTAN



**Prof. Dr. Ir. Joseph Stanislaus
Harjanto Prabowo, M.M.
(REKTOR BINUS UNIVERSITY)**

KATA SAMBUTAN

REKTOR BINUS UNIVERSITY

Prof. Dr. Ir. Joseph Stanislaus Harjanto Prabowo, M.M.

Yang sangat saya hormati Dekan fakultas Humaniora Ibu Elisa, yang saya hormati ketua program studi Business Law Bapak Ahmad Sofian, rekan-rekan faculty member di program studi Business Law, para mahasiswa, para alumni dari program Business Law, yang sangat saya banggakan, rekan-rekan pimpinan binus dan para BINUSIAN sekalian. Izinkan saya melalui video ini menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh rekan-rekan yang berada di program studi Business Law, yang pada hari ini ini memperingati ulang tahun atau Dies Natalis yang ke-10. Saya mengajak kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan, kita diberi kesempatan untuk bisa mengikuti acara ini yang berarti juga bisa melihat dan terus memperhatikan perkembangan dari program studi Business Law. Saya sangat bangga karena banyak sekali upaya-upaya kreatif hasil-hasil yang nyata yang telah ditunjukkan dari program studi Business Law. Saya tahu memang perjuangan yang sangat panjang, sebagai sebuah program studi yang relatif usianya muda di Bina Nusantara. BINUS University sendiri berusia yang ke-40 tahun, maka program studi Business Law yang 10 tahun ini, ternyata tidak kalah dalam hal memberikan karya, memberikan kontribusi untuk kemajuan dari program studi sekaligus nama baik dari Universitas Bina Nusantara. Selain bersyukur tentu kita juga punya komitmen bersama untuk membuat program studi ini disaat momentum ulang tahun ini untuk bisa berbuat lebih baik, merencanakan sesuatu yang lebih maju berkembang kedepannya. Kita tahu pada akhirnya perubahan-perubahan mendasar sedang terjadi dan akan terus terjadi di masyarakat, di kita semua pemicunya tentu saja ada revolusi industri 4.0 dan juga yang luar biasa karena pandemic Covid-19 ini. Saya percaya teman-teman yang ada di Business Law, para mahasiswa, para alumni, tentu terus memikirkan bagaimana supaya program studi kita ini melalui banyak kegiatan, banyak upaya untuk bisa lebih berkontribusi melakukan perubahan-perubahan yang membuat program kita tetap relevan bagi masyarakat bagi bangsa dan negara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat ulang tahun dies yang ke-10, semoga semua karya yang telah

dihasilkan kiprah alumni yang luar biasa, dan semangat para mahasiswa dari program Business Law dapat terus dikembangkan, dan Tuhan memberikan berkat kepada kita semua sehingga Business Law akan menjadi bagian penting dari BINUS University di dalam mencapai visi 2035-nya, untuk fostering and empowering ke society. Terima Kasih.

Tuhan memberkati.

KATA SAMBUTAN



**Dr. Elisa Carolina Marion, S.S., M.Si.
(DEKAN FAKULTAS HUMANIORA)**

KATA SAMBUTAN

DEKAN FAKULTAS HUMANIORA

Dr. Elisa Carolina Marion, S.S., M.Si.

Pertama-tama, Saya ingin mengucapkan selamat dies natalis kepada Jurusan Hukum Bisnis (*Business Law*) *BINUS University* yang ke-10. Dari segi usia, jurusan ini terbilang muda meskipun tidak bisa dibilang terlalu muda. Jika dibandingkan dengan program studi serupa di fakultas-fakultas hukum di berbagai perguruan tinggi, maka dapat dikatakan jurusan hukum bisnis telah mulai sejajar meskipun usia mereka jauh lebih tua. Jurusan hukum bisnis memiliki keunikan tersendiri karena sejak awal memfokuskan diri pada ICT (*International Commerce and Trade*) law dan ITC (*Information Technology and Communication*) law yang berbeda dengan kampus-kampus lainnya di Indonesia.

Jurusan hukum bisnis, merupakan salah satu jurusan yang ada di Fakultas Humaniora. Fakultas Humaniora juga memiliki keunikan dan terdiri dari beragam jurusan yaitu Sastra (Jepang, Inggris, Mandarin), Psikologi, Hubungan Internasional, Hukum Bisnis dan PGSD. Saya memiliki tantangan tersendiri dalam mengelola fakultas humaniora yang beragam disiplin keilmuan ini, dan salah satunya adalah jurusan Hukum Bisnis.

Jurusan Hukum Bisnis adalah salah satu jurusan yang telah memiliki akreditasi "A" (baik sekali) oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tanggal 14 November 2017, dengan Keputusan Nomor 4354/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017. Ini menunjukkan bahwa jurusan hukum bisnis *BINUS University* telah sejajar dengan jurusan/fakultas hukum lainnya di Indonesia. Ke depan, jurusan hukum bisnis sedang didorong untuk mendapatkan akreditasi internasional sehingga perlu terus menerus mengelola jurusan ini semakin profesional dan meningkatkan kinerjanya.

Saya juga berharap dukungan yang semakin luas dari berbagai *stakeholder* diberikan pada jurusan hukum bisnis, termasuk dari kalangan alumninya serta industri termasuk orang tua. Dalam masa pandemi COVID 19, tantangan semakin berat, tetapi kita harus bisa menghadapinya termasuk menciptakan inisiatif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Saya mendapatkan laporan dari Ketua jurusan bahwa untuk dies kali ini rangkaian kegiatan telah dilakukan, diantaranya webinar nasional dan webinar internasional, serta beberapa lomba yang ditujukan kepada pelajar dan mahasiswa, semoga rangkaian kegiatan ini mengeratkan kita semua, dan Business Law *BINUS* memberikan kontribusi kongkrit dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang semakin pelik dan kompleks.

Demikian harapan saya agar Jurusan Hukum Bisnis akan makin memberikan kontribusinya bagi lembaga, masyarakat, bangsa dan negara. Selamat berdies natalis dan selamat meneruskan tradisi yang baik ini.

Jakarta, 5 Juni 2021

LAPORAN KETUA JURUSAN



DR. AHMAD SOFIAN S.H., MA

LAPORAN PERKEMBANGAN JURUSAN

(Juli 2020-MEI 2021)

RINGKASAN

Kurun Waktu Juli 2020-Mei 2021 *Business Law* menjalankan mandat dengan beberapa program rutin dan juga dan inisiatif baru. Kami telah menyelesaikan kurikulum baru dan juga menerima kerjasama dengan berbagai lembaga dalam dan luar negeri. Tahun ini adalah tahun ke-10 berdirinya BL. Jumlah partner kerjasama dari tahun ke tahun meningkat. Hal lain yang sudah dicapai dalam 1 tahun terakhir adalah mengembangkan berbagai video pembelajaran *online*. Memperkuat media sosial dan jaringan global. Jumlah dosen yang menyelesaikan pendidikan doktor udah mencapai 65 persen, dan sisanya sedang menyelesaikan pendidikan doktor, diperkirakan 3 tahun yang akan datang, 98 persen FM di BL bergelar doktor. Jumlah yang mendaftar dan yang diterima juga mengalami peningkatan, ini menunjukan kepercayaan mayarakat dan kualitas pengajaran makin meningkat. Di era pandemic COVID-19 tantangan pengajaran secara oline menjadi issue tersendiri dan secara perlahan kita bisa mengatasinya dan menjadi pola pengajaran normal. Sebagai catatan juga di tahun 2020 *Business* menjadi kampus yang pertama mengadakan kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) secara online dengan peserta sebanyak 25 orang. Tahun 2020, berhasil di launching proseding nasional 1, dan akan ada yang ke-2 dan seterusnya.

PENGAJARAN

Sumber data yang menjadi acuan dalam pelaporan perkembangan Jurusan Hukum Bisnis (*Business Law*) diambil dari situs resmi Jurusan Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara (**BINUS**) (www.business-law.binus.ac.id) yang secara rutin memuat laporan kegiatan jurusan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, sebagian besar dari kegiatan-kegiatan yang dilaporkan ini dapat dirujuk narasi dan foto-fotonya dari situs tersebut.

Jumlah mahasiswa aktif mengikuti studi di Program Studi S-1 BINUS selama satu tahun terakhir ini adalah sebanyak 322 orang (data Mei 2020). Dari jumlah ini, yang termasuk sebagai mahasiswa baru yang masuk dan teregistrasi sebagai mahasiswa di semester ganjil tahun akademik 2019/2020 sebanyak 108 orang (dari target 90 orang). Sampai saat ini, jumlah alumni yang lulus sebagai sarjana hukum adalah sebanyak 178 orang sampai dengan wisudah 61.

Jumlah dosen yang selama ini rutin terlibat dalam proses belajar-mengajar di Jurusan Hukum Bisnis BINUS sebanyak 20 (dua puluh) orang, dengan rincian menurut status kekaryawanan serta catatan pendidikan terakhir dan area utama keahlian mereka, adalah sebagai berikut:



No.	Nama Dosen	Status kekarya-wanan	Catatan pendidikan terakhir dan area utama keahlian
01	Shidarta	LS S-3	Doktor Hukum (Filsafat Hukum)
02	Besar	FM SCC	Doktor Hukum (HKI)
03	Paulus Aluk Fajar Dwi Santo	FM SCC	Kandidat Doktor Hukum
04	Bambang Pratama	FM SCC	Doktor Hukum (Hk. Telematika)
05	Ahmad Sofian	FM SCC	Doktor Hukum (Hk. Pidana)
06	Abdul Rasyid	FM SCC	Doktor Hukum (Hk. Business Syariah)
07	Iron Sarira	FM SCC	Doktor Hukum (Hk. Ketenagakerjaan)
08	Vidya Prahassacitta	FM SCS	Kand. Doktor Hukum (Hk Pidana)
09	Erni Herawati	FM SCS	Kand. Doktor Hukum (Hk. Perdata)
10	Erna Ratnaningsih	FM	Doktor Hukum (Hk. Tata Negara)
11	Agus Riyanto	FM	Kand. Doktor Hukum (Hk. Investasi)
12	Siti Yuniarti	FM	Kand. Doktor Hukum (Hk. Telematika)
13	M. Reza Syariffudin Zaki	FM	Doktor Hukum (Perdagangan Intern'l)
14	Nirmala Many	FM	Magister Hukum (Hk. Maritim/Intern'l)
15	Batara Mulia Hasibuan	FM	Kand. Doktor Hukum (Hk. Bisnis)
16	Stijn Cornelis van Huis	LS S-3	Doktor Hukum (Hk. Intern'l; Sosiolegal)
17	M. Battleson	AFM	Magister Hukum (Hk. Bisnis)
18	Januardo S.P. Sihombing	AFM	Kand. Doktor Hukum (Hk. Bisnis)
19	Ermanto Fahamsyah	AFM	Doktor Hukum (Hk. Perkebunan)
20	Niken Savitri	AFM	Doktor Hukum Dasar

Dengan mencermati perkembangan studi lanjut para dosen FM di atas, maka diprediksi dalam dua-tiga tahun ke depan, paling tidak 95% dosen tersebut dapat menyelesaikan studi doktor mereka. Dilihat dari jenjang kepangkatan akademik, terdapat 14 (empat belas) dosen FM berstatus sebagai dosen berjenjang kepangkatan akademik. Sisanya, sebanyak 1 (satu) orang sedang diproses jenjang kepangkatan akademik mereka pada tahun 2020 ini.

Di samping itu, ada dosen tamu yang juga rutin memberikan kuliah sebagai *visiting professor*, yaitu Prof. Dr. Stefan Koos dari *Bundeswehr University*, Munich, Jerman. Selama satu tahun terakhir juga ada dosen-dosen tamu dari para praktisi hukum yang telah ikut mengisi mata kuliah tertentu, khususnya Kapita Selekta. Selain itu, ada juga praktisi hukum asing yang melakukan *corporate social responsibility* (CSR), yaitu Kin Wah Chow dari *Suryomurcito Lawfirm*. Mereka yang tercatat telah berkontribusi antara lain adalah:

No.	Nama Dosen Tamu	Asal Institusi
1.	Kin Wah Chow	<i>Registered foreign lawyer</i> yang bekerja pada Suryomurcito Law Firm (member of the Rouse Network).
2.	Prof. Dr. Iur Stefan Koos	Guru Besar Bunderwehr University, Munich, Jerman
3	Kiyoshi Sugimoto	Asahi Nishimura Lawfirm

Selama setahun terakhir ini model pembelajaran dengan *digital content* sudah mulai dipersiapkan dan dipublikasikan melalui media sosial yang terakses dengan baik oleh para mahasiswa.

Pelatihan-pelatihan terkait dengan model pembelajaran yang disebut "blended learning" juga sudah disosialisasikan kepada para dosen terkait. Dengan perkembangan ini, diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan akan ada perubahan yang cukup fundamental dalam gaya belajar-mengajar di Jurusan Hukum Bisnis BINUS.

Program 3+1 yang mulai diintroduksi di semua program studi di lingkungan BINUS akan menjadi peluang sekaligus tantangan pula bagi Jurusan Hukum Bisnis BINUS. Jurusan ini perlu sigap menyikapi perubahan-perubahan tuntutan dan kebutuhan baru di dunia kerja, termasuk yang dihadapi oleh profesi hukum. Untuk itulah pada tahun 2020, kurikulum pendidikan hukum strata satu di Jurusan Hukum Bisnis BINUS dipastikan akan mengalami perubahan-perubahan signifikan untuk menjawab peluang dan tantangan itu.

Munculnya kebijakan nasional Kampus Merdeka mengakibatkan BINUS termasuk Business Law melakukan revisi kembali terhadap kurikulum pengajaran, proses revisi sudah rampung tinggal menunggu finalisasi.

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tahun ini mengalami transformasi karena adanya COVID-19. Demikian juga halnya dengan kegiatan kemahasiswaan mengalami perubahan dari yang face to face, berubah menjadi *online*. Di awal-awal COVID-19 memang ada kendala, namun proses selanjutnya bisa dilaksanakan dengan memanfaatkan *platform digital*.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN DIRI

Business Law terus mengembangkan pelayanan kepada masyarakat melalui konsultasi online dikembangkan berbasis website. Berikut ini ditampilkan data betapa masyarakat menaruh minat atas konten yang disajikan di web dan layanan hukum gratis yang diberikan oleh para dosen secara online

Dilihat dari aktivitas para dosen dan mahasiswa yang dilakukan selama satu tahun terakhir antara lain tercatat sebagai berikut:

Tanggal	Tempat	Temu Ilmiah	Penyelenggara	Dosen/mahasiswa yang terlibat
28-29 juni	Online	Konferensi nasional Online dan Call for Abstract	AFHI, EPISTEMA, HUMAN, APHA	Shidarta
1 Juli	PERADI	Rapat Persiapan PKPA ONLINE	Business Law Dept. BINUS University	Ahmad Sofian, Nirmala, Batara, Siti Yuniarti
3 Juli	Online	Workshop Jarak Jauh untuk Hakim	KY	Shidarta
7 Juli	Online	Indonesia Society of International Law Lectur	ISIIL	Reza Zaki
22 Juli	Online	Pembicara International Webinar ‘Measuring Public Interest : Intent Blocking in Theory and Practice	Business Law, Leiden Universisty, van Vollenhoven institute	Bambang Pratama, dan seluruh FM
22 Juli	Online	Pembicara Refleksi	KPPU	Shidarta

		Pengajaran Hukum Persaingan Usaha		
3 September	Online	Business tuan Rumah Rapat nasional forum dosen persaingan usaha	FDPU-BUSINESS LAW	Shidarta, ahmad sofian, besar, bambang
3 September	Jakarta	Moderator Seminar internasinal "Indonesia Investment"	PERADI, BKPM, Konsulat RI di Taiwan	Nrimala Many (moderator)
29 September – 1 oktober	Online	Pembicara The fifth International University Symposium on Humanities and Arts (INUSHARTS)	INUSHARTS	Shidarta
29 September 2020	Online	Narasumber dalam Webinar Series Indonesia Sharia Economic Festival 7th (ISEF 7th) tentang "Urgensi RUU Ekonomi Syariah Dalam Rangka Optimalisasi Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Perekonomian Nasional	Bank Indonesia bekerjasama dengan IAEI dan KNEKS.	Abdul Rasyid
7 oktobr	Online	Guest Lecturer Profesor Stefen Koos	Jurusan Hukum Bisnis (Business Law) BINUS University	Mahasiswa dan dosen
20 Oktober	Daring	Memberikan Pelatihan Penalaran Hukum bagi Hakim se-Indonesia	KY	Shidarta
28 Oktober	Online	Diskusi kurikulum fakultas hukum dengan Unja	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Shidarta
30 Oktober	Online	Memberikan Pelatihan Penalaran Hukum untuk Kurator dan Pengurus (AKPI)	Asosiasi Kurator dan Pengurus (AKPI)	Shidarta
29-30 Oktober	Online	Memberikan pelatihan kepada Jaksa	Badan Diklat Kejaksaan	Ahmad Sofian
4 November	Online	Memberikan materi dalam seminar internasional tentang penculikan anak oleh orang	KEMENHUKUM HAM	Stijn van Huis
9 November	Online	Pembicara Menyelami Pemikiran Hukum Progresif, Merangkai Jaan Mewujudkan Hukum dan Berkeadilan	Program Doktor UNDIP	Shidarta
30 November	Online	Pembicara seminar pembangunan hukum nasional	BPHN	Stijn van Huis
5-6 desember	Online	Worshop digital content	Business Law	Dosen dan beberapa mahasiswa
23 Deember	Online	Launching Prosiding Nasional	Busines Law	Ahmad Sofian, Shidarta
7 Januari	Online	Menjadi guest lecturer dalam Law Professional Practicum	ACICIS	Stijn van Huis
30 Januari	Online	Pemaparan dosen BL dalam Diskusi Problematika	FH UNEJ	Shidarta

Penulisan Karya Ilmiah				
18 Feb-31 Maret	Online	Penugasan Sebagai Tenaga Ahli Reviewer Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Strata 1	Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia	Abdul Rasyid
18 Februarui	Online	Memberikan pelatihan pada Penyidik Badan POM	Badan POM	Ahmad Sofian
25 Februari	Online	Memberikan pelatihan BINUS Sartup Accelartor	BINUS	Bambang Pratama
5 Maret	Online	Memberikan Diskusi Pemikiran Bernard Arief Shidarta	FH UNPAR	Shidarta
17 Maret	Online	Memberiikan materi symposium nasional hukum bisnis	Kusumaatmadja Law	Bambang Pratama
26 Maret	Online	Moderator Menapaki Jejak Pemikiran Muladi	MAHUPIKI	Ahmad Sofian
9 April	Online	Workshop Karakteristik Putusan Hakim	KY	Shidarta, Niken Savitri
29 April	Online	Memberikan mataeri Kelas akademik penalaran hukum	PLEADS	Shidarta
7 mei	Online	Memberikan kuliah Program Pascasarjana UGM	PASCA SARJANA UGM	Shidarta

KERJASAMA DAN KOLABORASI

Selama satu tahun terakhir ini juga telah diadakan berbagai kolaborasi dengan banyak lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kerja sama yang dilakukan meliputi aneka program dan aktivitas. Memang tidak semua dari kerja sama ini, mengingat kebutuhan teknis di lapangan, tidak selalu dipayungi dengan memorandum kesepahaman yang lazim diperlukan apabila akan dicatatkan. Selama ini, Jurusan Hukum Bisnis lebih mengutamakan realisasi dari kerja sama tersebut, dengan pertimbangan akan memberi manfaat jangka panjang bagi institusi. Kolaborasi yang dimaksud dilakukan antara lain dengan:

No.	Rekanan Kolaborasi	Program/Aktivitas Kerja Sama
01	Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) angkatan IV Online	Penyelenggaraan PKPA Industri DPN PERADI
02	Diskusi Filfsat Hukum PEMILU	Kerjasama AFHI (Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia) Industri Program Pasca Universitas Atmajaya Yogyakarta dan Jurusan Hukum Bisnis BINUS
03	Global Learning System	Ada 10 partner dari industry yang bersedia menjadi partner dalam GLS di Jurusan Hukum Bisnis
04	Komisi Yudisial RI	Penyelenggaraan pelatihan; seminar; publikasi dosen.
05	Ditjen Kekayaan Intelektual (KI)	Mitra GLS; undangan seminar; fasilitas magang.
06	Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)	Mitra GLS; undangan seminar
07	Indonesian Criminal Justice Reform (ICJR)	Mitra GLS; penyelenggaraan seminar; pelatihan.

08	Mahkamah Agung	Mitra GLS; undangan seminar.
09	Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI)	Seminar; asosiasi dosen.
10	Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU)	Seminar; asosiasi dosen.
11	Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki)	Seminar; asosiasi dosen.
12	Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	Pelatihan advokat rutin.
13	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	Mitra GLS; seminar.
14	National Taiwan Ocean University (NTOU), Taipei , ROC	Pemberian fasilitas magang untuk mahasiswa
15	Chengshiu University, Kaohsiung, Taiwan, ROC	Pemberian fasilitas magang untuk mahasiswa.
16	Bundeswehr University, Munich, Jerman	Visiting professorship, pembuatan digital content.
17	Kozminsky University, Warsawa, Polandia	Visiting lecturer.
18	Kiyoshi Sugimoto	Mitra Guest Lecturer
19	Asosiasi Sentra Kekayaan Intelektual Indonesia (ASKII)	Mitra GLS; asosiasi dosen.
20	Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham	Penelitian; publikasi; seminar.
21	Suryomurcto Lawfirm	CSR; Pemberian fasilitas magang mahasiswa.
22	MKK Lawfirm	Pemberian fasilitas magang mahasiswa.
23	Tito Hananta Lawfirm	Pemberian fasilitas magang mahasiswa.
24	ABNR Lawfirm	Pemberian fasilitas magang mahasiswa.
25	Bank BTN	Pemberian fasilitas magang mahasiswa.
26	Bank BCA	Pemberian fasilitas magang mahasiswa.
27	Bank BRI	Pemberian fasilitas magang mahasiswa.
28	May Bank	Pemberian fasilitas magang mahasiswa.
29	Bank Mandiri	Pemberian fasilitas magang mahasiswa.
30	PT Telkom Indonesia	Pemberian fasilitas magang mahasiswa.
31	PT Garuda Indonesia	Pemberian fasilitas magang mahasiswa.
32	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)	Mitra yang melakukan studi banding ke jurusan hukum bisnis
32	Fakultas Hukum Universitas Riau	Mitra Studi Banding
33	Akset Law Firm	Mitra Kuliah Tamu
34	Nagoya University Jepang	Mitra Kuliah Tamu
35.	PUSHAM UII	Mengadakan FGD
36.	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Mitra Studi Banding
37.	Law Firm HBT	Mitra dalam FGD Kurikulum dan Magang
38.	LBH Jakarta	Mengadakan Diskusi Publik dan Tempat Magang
39	Leiden University	Seminar internasional
40	Vanvollenhoven Institute	Seminar internasional
41	BPOM	Taining
42	Badan Diklat Kejaksaan	Training
43	Ekonomi Syariah	Seminar
44.	Himpunan Ilmuwan an Sarjan Sayariah	Seminar

44	KNEKS	Seminar
45	Rumah Imperium	Seminar
46	Putra Daerah	Seminar

PENELITIAN DAN PUBLIKASI

Mahasiswa hukum yang kuliah di Jurusan Hukum Bisnis BINUS didorong untuk memiliki kemampuan berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Untuk itu, dalam satu tahun terakhir mahasiswa makin dimotivasi untuk mengikuti kegiatan temu ilmiah di tingkat internasional, paling tidak dalam lingkup regional. Sebagai contoh, dua orang mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis mengikuti international conference on law and justice, yang diadakan oleh University Malaya November 2019. Untuk kegiatan non-akademik, yakni di bidang seni seorang mahasiswa jurusan hukum bisnis berhasil menjadi duta seni nasional dari Kementerian Ekonomi Kreatif RI.

Publikasi dosen dan mahasiswa adalah salah satu yang terus digalakkan. Direncanakan tahun ini akan diterbitkan 1 buku yang berjudul "Aspek Hukum Informasi dan Teknologi". Saat ini sudah ada dua buku yang diserahkan ke RTTO BINUS untuk didaftarkan hak ciptanya dengan penyerahan kepemilikan hak ciptanya ke institusi BINUS. Menerbitkan Buku yang berjudul "Hukum Pariwisata Syariah di ASEAN" oleh Penerbit Prenada Media yang ditulis oleh Reza Zaki & Abdul Rasyid. Menerbitkan Buku yang menjadi Best Seller di Gramedia dengan judul "Desa Butuh Lo Sob" oleh Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia yang ditulis oleh Reza Zaki & Shidarta, buku ajaran kausalitas hukum pidana yang ditulis oleh Ahmad Sofian, buku Aspek hukum ekonomi dan bisnis yang ditulis oleh Shidarta, Abdul Rasyid, dan Ahmad Sofian, buku Keberlakuan hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditulis oleh Iron Sarira, buku hukum perdagangan internasional yang ditulis oleh Reza Zaki, buku Pemikiran hukum, ekonomi dan politik internasional yang ditulis oleh Reza Zaki, dan buku putih hukum siber yang ditulis oleh Shidarta dan Bambang Pratama.

Publikasi rutin para dosen selama ini disalurkan melalui program *knowledge management* (KM) di website *Business Law* BINUS. Sangat menggembirakan bahwa sambutan pembaca terhadap rubrik FM ternyata sangat luar biasa, sebagaimana terbukti dari banyaknya pertanyaan yang masuk ke redaksi. Demikian juga dengan permintaan konsultasi hukum.

Jumlah Publikasi Jurnal/Proseding Dosen
Juli 2020 – Mei 2021

Publikasi Internasional	Publikasi Nasional
24	8

PRESTASI DAN KEGIATAN MAHASISWA SERTA ALUMNI

Di jurusan hukum bisnis ada organisasi kemahasiswaan yaitu HIMSLAW (Himpunan Mahasiswa Business Law) dan ada juga organisasi yang dibentuk berdasarkan peminatan yang disebut dengan club mahasiswa. Saat ini ada Moot court (M3BL : Mahkamah Mahasiswa Business Law) yang dibentuk tahun 2016 dan tahun 2020 dibentuklah ILSA (International Law Student Association). Selain itu ada juga kelompok mahasiswa yang mengembangkan media sosial Business Law.

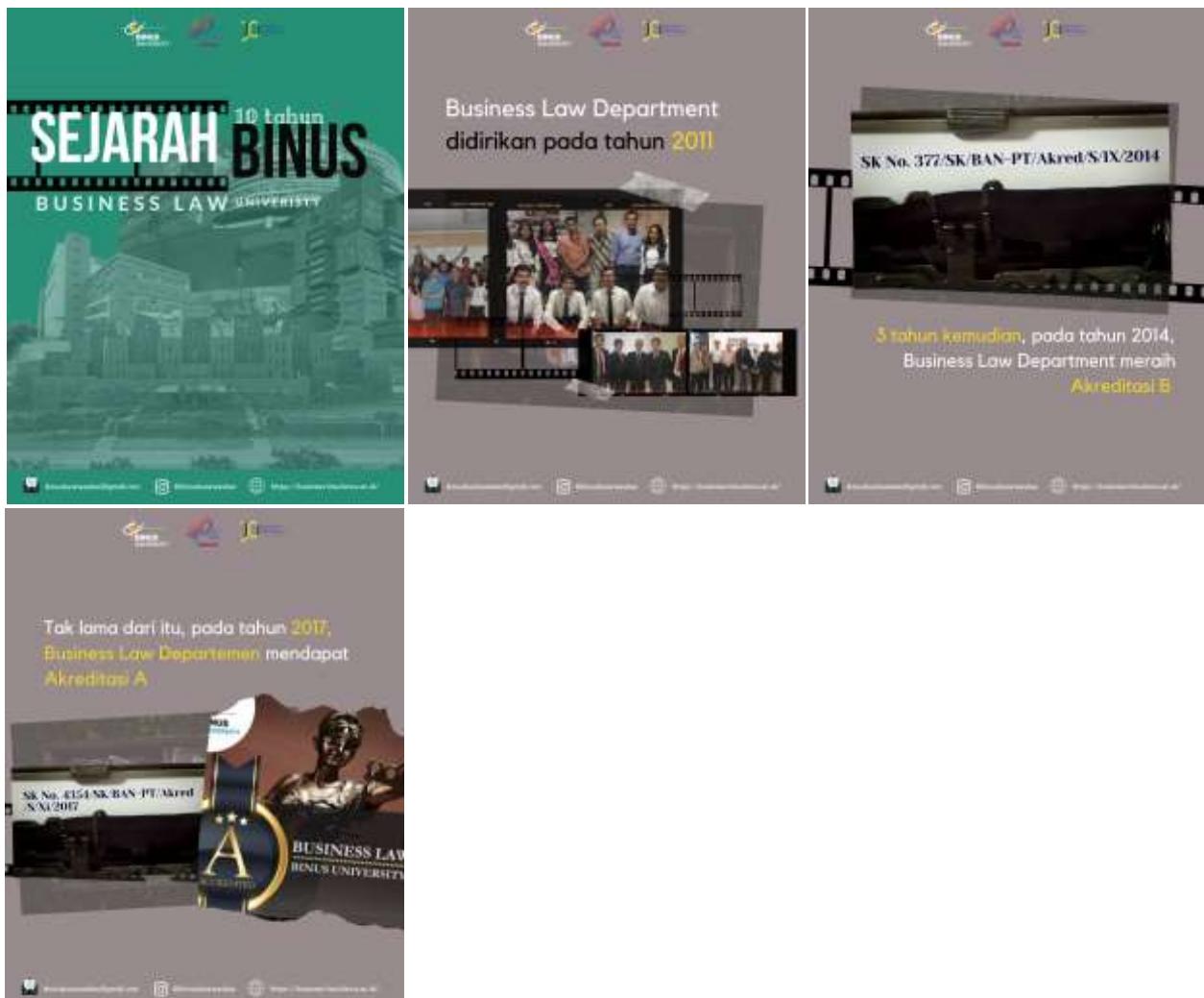
Berikut ini ditampilkan prestasi mahasiswa Busines Law:

Tahun	Nama event	Prestasi	Keterangan/Delegasi
2020	International Humanitarian Law Moot Court Competition 2020	Juara 1 The Best Memorial for Prosecutor	1. Muhammad Farhan Akmal (Binusian 21) 2. Ivan Raditya Sinay (Binusian 22) 3. Ibrahim Al Ajib (Binusian 23)
2020	Willem C Vis International Commercial Arbitration Moot Court Competition, Vienna, Austria 2020	Peserta	1. Muhammad Farhan Akmal (Binusian 2021) 2. Ivan Raditya Sinay (Binusian 2022) 3. Dina Aditania (Binusian 2022) 4. Zahra Latifah (Binusian 2022) 5. Barry Renata (Binusian 2022) 6. Kyle Pietra Inggil (Binusian 2023)
2020	Merpati Putih BINUS University	Ketua Umum	Khansa Nur Aidah
2020	University of Economics & Business, Austria dengan jurusan International Tax Law (Vienna)	Alumni Meraih Beasiswa S2 DDTC	Yurike Yuki
2020	NBLC ILOC	Peserta	Delegasi 1: Dina Aditania Handini Ayu Lestari Delegasi 2: Yustisio Arya Rahma Christabel
2021	NBLC Summit	Peserta	Rahma Christabel Abilah Muhammad Haykal Zaskia Choirunnisa

Berikut ini Postingan Mahasiswa Business law di media sosial

Instagram	Youtube	Tiktok	Linkedin
116	23	5	1

Sejarah 10 Tahun Business Law BINUS University



Prestasi Mahasiswa dan Alumni





Prestasi dan Kolaborasi

Prestasi & Kolaborasi

Business Law BINUS memiliki keunggulan dalam **Digital Content**.

Terbukti website Business Law hingga tahun 2020 telah dikunjungi oleh 1,75 juta pengunjung dengan berbagai macam pelayanan konstitusi hukum dan berbagai bidang hukum.

Sejumlah dosen diundang sebagai keynote speaker di perguruan tinggi luar Indonesia seperti Universitas Amsterdam, Belanda; Universitas Komisar, Warsawa, Polandia; Universitas Chegkung dan Universitas Tungha, Taiwan.

Komposisi dosen yang bergelar Doktor Terbanyak di Fakultas Humaniora BINUS University

Tampilnya sejumlah dosen dari Program Studi Hukum Bisnis untuk melakukan pembelaan dan pendampingan terhadap berbagai komunitas yang marginalkan

antara lain hadir sebagai ahli untuk memberi keterangan di pengadilan, khususnya Mahkamah Konstitusi

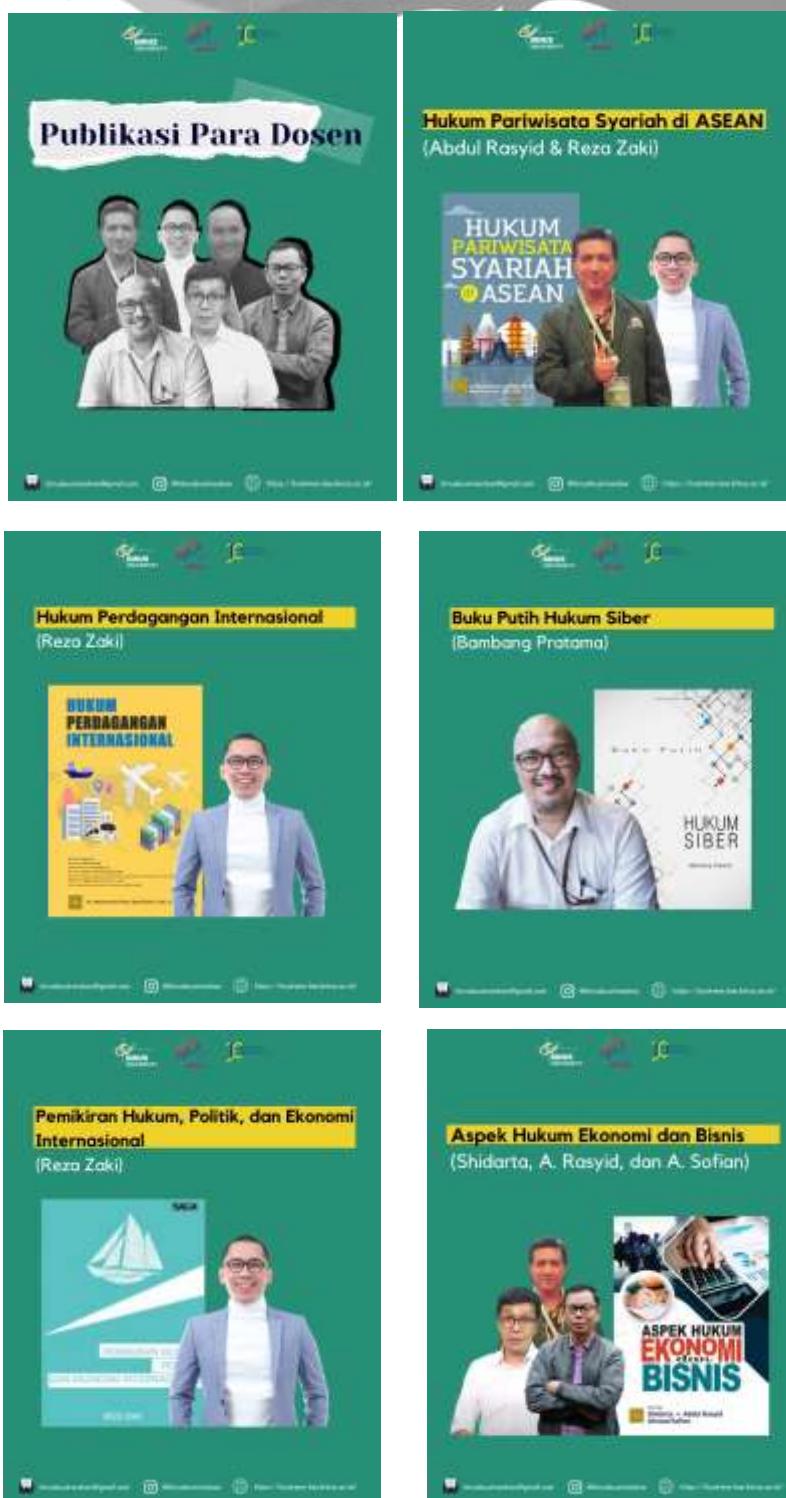
Publikasi dan para dosen, baik secara mandiri maupun bersama-sama. Buku yang dihasilkan antara lain:

1. Hukum Perintegrasian Asean di ASEAN (Riyadi & Zaki)
2. Deed Bintang Lo Sob-Dzaki & Shodarat
3. Ajaran Konsultasi Hukum Pidana (Ahmad Sohoni)

HUKUM FARWIYATA SYARIAH ASEAN
JUARAK HAKIHLAH MELINTAS PADA



Publikasi Para Dosen





Prestasi Srikandi Business Law BINUS University



Public lecture at the 10th Dies Natalis of Business Law BINUS

“Law and interdisciplinarity in a time of transformation: the “new normal” at law institutions of higher education?”

Stijn Cornelis van Huis

Honorable Rector BINUS University, Prof. Dr. Ir. Joseph Stanislaus Harjanto Prabowo, M.M.

Honorable Vice Rectors BINUS University

Honorable Dean of the Faculty of Humanities BINUS University, Dr. Elisa Carolina Marion, S.S., M.Sc.

Honorable Dr. Ahmad Sofian, S.H., MA, Head of Department, Business Law BINUS University

Dear colleagues and fellow students

First of all, I want to say that there are no words to express how honored I am to hold this oration at the 10th Dies Natalis of Business Law BINUS. Next, as a newcomer at Business Law BINUS, who only became a faculty member two years ago (August 2019), I want to express my gratitude for the way the university, the faculty and my colleagues of Business Law have welcomed me among their midst and provided me with a warm working environment. We all have experienced an extreme year, and I believe that BINUS has managed to adapt well to the challenges and new realities, the so-called “new normal” that we are all living in.

This brings me to the subject of my oration *“Law and interdisciplinarity in a time of transformation: the “new normal” at law institutions of higher education?”*

Those who are familiar with my background will not be surprised that I chose the topic of interdisciplinarity in this oration, as my research mainly has focused on the functioning of law and legal institutions in society. The socio-legal and Law & Society approaches I have applied in my research required the use of interdisciplinary methods, a combination of legal, anthropological and sociological methods, and an analysis based on concepts drawn from political science and development studies.

The other main component of the title is the phrase “time of transformation”. The kind of transformation I refer to is not the trend of businesses that outsource legal contract drafting at the expense of the number of new lawyers they recruit, not the digital disruption of the legal profession, and not social distancing rules or online teaching. The transformation I refer to is related to two developments in Indonesia: *first*, the requirement of Law lecturers to publish for international journals; and, *second*, the *merdeka belajar/kampus merdeka* policy of the current Indonesian government. I believe that these two developments require institutions of higher legal education in Indonesia to complement their traditional dogmatic approach to law with interdisciplinary approaches to law.

Let me start with the first point: “the requirement for Law lecturers to publish in international journals”. A major problem that Indonesian Law lecturers face is that there are almost no Indonesian internationally reputable (Scopus) journals specializing in law. This means that Law lecturers must look abroad for international publications, and in the international context Indonesian legal issues in itself may not be considered important or

interesting enough to publish. It is unlikely that foreign reputable international journals will publish pure dogmatic legal analysis of Indonesian civil law if this analysis is not linked to some kind of trendy contemporary issue. At the very least, lecturers will have to describe the social relevance of the legal issue discussed in the paper. This means that the legal issue will have to be linked to societal issues, and by extension, legal, social, economic, political, and cultural developments in Indonesia and elsewhere. In other words, as a consequence of the requirement to publish in international journals Indonesian Law lecturers will more and more be forced to engage with Legal Anthropological, Law & Society, and Law & Economics literature. Moreover, Law lecturers that want to publish papers based on interdisciplinary research will have to prove that they have used proper socio-legal research methods when gathering their data. Law lecturers of the future will have to train themselves in how to apply and how to present interdisciplinary socio-legal research in their papers.

In the social sciences, interdisciplinary, multidisciplinary and transdisciplinary approaches are commonplace. Increasingly, research funding agencies have adopted “interdisciplinarity” as a main criterium for research grants. Without an interdisciplinary approach, your chances to receive a grant in the social sciences often are slim. The discipline of Law, however, traditionally does not have much affinity with interdisciplinarity – especially also in Indonesia. How come?

Legal education at universities has a unique approach, as it is primarily vocational-oriented. Law schools, especially at the bachelor level, primarily focus on how to produce legal practitioners – not academics. Graduates are mainly expected to be able to practice law: to find legal remedies for legal problems, to apply legal regulations in a logical and systematic manner and to formulate logical and systematic legal arguments.

Moreover, in legal education, Law is mostly approached as a closed system. Students are trained to find solutions within the existing legal framework. When analyzing a legal dispute, a student must learn how to place the facts of a case under the relevant legal regulations, they learn how to single out legally relevant issues, and to find the best legal solution under the existing legal framework. A bit similar to a doctor who links a patient's health problems to symptoms of diseases in order to come to a sound diagnosis and related remedies.

In doctrinal legal education the link between law and society has been mostly detached. This detaching is done consciously, to teach students how to fit the facts and circumstances in which legal issues occur, into the demarcated definitions and legal concepts that the legal framework provides. Students must learn how to translate the concrete facts of a case into abstract legal language first. A systematic and logical linkage between the facts of the case and relevant legal rules and concepts, is key in finding a legal solution to a case. Law students must master this skill of doctrinal analysis of law first. Temporary closing the door to society is seen as the way to achieve this. At this stage, the Law itself is not questioned.

What other skills do law graduates need to acquire? The SLEEI (Strengthening Legal Education in East Indonesia) program where I have been involved in, believes that logical and systematic legal reasoning, which students learn through the analysis of legal cases and construction of legal arguments, should receive sufficient attention, as this is the core work of legal practitioners. Internships will then teach students how to do legal work in a team, and develop social skills needed on the work floor.

The SLEEI program holds that in conducting legal analysis and constructing legal arguments law students should also learn to critically evaluate how the legal issue they handle relates to: 1. Ethical issues, 2. Gender issues, and 3. The local context. Take the point of placing the legal issue in the local context. Despite the important role that courses

such as law and society, and women and law have played in developing, preserving, or bringing back the societal context in legal education in Indonesia, the general focus of legal education remains on solving the legal puzzle. In practice, a solution of the legal puzzle will not always prove to be a workable remedy in view of the social, cultural, religious, economic and political contexts in which the legal issue occurred. For graduates who will find employment at government institutions, it is important to realize that the legal system is not closed at all. Legal education closes the door to society so that students can fully plunge into the system of legal rules. However, Law lecturers have the responsibility to open the door to society again so that students learn how law works in the real world. Here, the *merdeka belajar/kampus merdeka* perhaps can play a role as it provides students the opportunity to learn topics, theories and research methods outside the legal field.

Knowledge about the law is essential for Law graduates, otherwise a graduate will not be able to link the facts to the relevant regulations and make a sound legal analysis. However, the academic status of legal education requires that students are also taught the skill of critical thinking about the law. Many (and the global trend is: increasing numbers of) law graduates will find work outside the legal professions and, therefore, these skills of critical thinking gain importance. Graduates have to be able to do more than constructing a legal argument.

The ability to critically analyze legal cases, however, is also an asset for legal professionals. Consider the following table of basic legal research questions, taken from Kees Waaldijk:

Nine Possibilities of Doing Legal Research

(Kees Waaldijk 2009, quoted by Wiratraman 2013)

		Three types of questions posed		
The three types of answer looked for		1 <i>De lege lata</i> (<i>the law as it exists</i>): What does the law hold?	2 How does law work?	3 <i>De lege ferenda</i> : what law would be desirable?
	a. Factual	Descriptive What do recognised sources of law hold about a particular topic?	Empirical How does a given law operate in practice?	Instrumental What should the law say to contribute to achieving a certain goal?
	b. Theoretical	Conceptual To what more general concepts can certain legal rules be reduced?	Explanatory What causes can be found to explain a given law or its practical	Fundamental What should the law say to be (more) compatible with a certain legal principle?

			operation?	
c. Normative	Supervisory Is a certain legal rule compatible with higher law?	Evaluative Does a given law contribute to achieving its goal?	Political What should the law say to contribute to the realization of a given political idea?	

Of the nine most basic legal research questions, five questions concern how law operates in society. This proves that law cannot solely be viewed as a closed system by legal scholars – the link with society is essential.

Outside these basic legal research questions, there are many other socially relevant research questions that a researcher of Law may pose about certain regulations, rights and obligations: do people within society or within a certain community know about these regulations, rights, and obligations? Do they know what institutions/persons they can turn to when they need to call upon a certain right, obligation, or regulation? Do they consider a regulation as “just”? To what extent does the presence of alternative norms (e.g. from adat or religion) facilitate or hamper the implementation of a certain regulation? Are women’s interests and needs sufficiently taken into account by a regulation? Do state institutions and political and economic players support or hamper the implementation of a regulation on the local level?

The potential list of social relevant questions pertaining to the interaction between law and society is endless. The list above mainly relates to the disciplines of sociology and anthropology, but there are many intersections with other disciplines as well. For instance, a legal drafter may be expected to draft a legal regulation that provides the largest economic benefits for large enterprises, without causing economic harm for small and medium-sized enterprises. In such case the legal drafter must consider the following questions: What are the expected economic consequences of the implementation of the new regulation for: a. large enterprises; and, b. small and medium-sized enterprises? Here, the discipline of law clearly interacts with that of economics. At least multidisciplinary cooperation is required, as the legal expert must coordinate with economists in drafting the regulation. If the legal drafter has zero knowledge of the discipline of economics and the economists have zero knowledge of the discipline of Law, such coordination will turn out to be complicated. The danger of misunderstandings and miscommunication is real, and in the end may result in legal reforms that cannot fulfill its social and economic objectives.

Law is also closely related to the field of politics. Therefore, it is important that a draft regulation/law has a rationale (*naskah akademik*) that convincingly clarifies how the proposed legal changes will bring about outcomes that are in line with policy objectives. A bit of knowledge about how politics work may prove essential when trying to convince political players of the benefits that a regulation is expected to bring about. The drafters of the *naskah akademik* may map the political playing field first and give extra attention to counter-arguments of potential opponents to the draft regulation. Questions that play a role here are: To what extent is there political support for the implementation of legal reforms; Which parties need to be convinced of the benefits of a legal reform; How to

anticipate opponents' counter-arguments; Where is the common ground located between the regulation and the views of political opponents?

Similarly, there are links between law and the health sector, law and psychology, law and biology, law and physics, law and semiotics. There clearly is a strong potential for interdisciplinary approaches to law. The skills to conduct interdisciplinary or multidisciplinary research is a skill much looked for by Indonesian Ministries, donor agencies, NGOs, companies that carry out CSR programs, etc.

Above, I have argued that Law lecturers are increasingly required to publish in international journals. Therefore, it is likely that lecturers will engage with legal anthropological, law & society, and law & economics literature; and try to acquire the skills to conduct socio-legal research. The *merdeka belajar/kampus merdeka* policy provides a chance for law students to follow courses that will teach them how to conduct non-doctrinal research. It is well-possible that many law graduates of the future will need a more diverse and complete package of skills. Because of digitalization, and especially following the financial crisis in 2008, the prospects of law graduates in the USA have decreased and many have to look for employment outside the legal professions – a change that likely is happening today in Indonesia as well. Hence, I have pleaded that Law graduates must learn the skills needed to critically engage with law, by considering ethics, gender issues and the local contexts in their legal analysis. The skill of critical thinking is an essential skill of any academics. The next step is to acquire the skill of applying non-doctrinal, socio-legal approaches to law. Current trends indicate that interdisciplinarity will become the new normal in the legal discipline. Let's adapt and embrace this development.